



Implementasi SP2D Online Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Kasus di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ratna Ningsih, Violina

Sistem Informasi Manajemen ISBA ATMA LUHUR Pangkalpinang,
Ningsihratna52@gmail.com, violinaolyn@gmail.com

Abstrack

The implementation of digitalization in regional financial management has become a strategic effort by the government to enhance efficiency, transparency, and accountability in public financial governance. One of the innovations developed is the implementation of the Online Fund Disbursement Order (SP2D Online), which is integrated with regional financial information systems and banking systems. This study aims to analyze the implementation of SP2D Online in improving the efficiency of regional financial management at the Regional Financial Agency (BAKUDA) of the Bangka Belitung Islands Province, to identify the challenges encountered, and to formulate optimization strategies. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis is conducted using a descriptive-comparative method by comparing conditions before and after the implementation of SP2D Online. The results indicate that the implementation of SP2D Online has a positive impact on the efficiency of regional financial management, as reflected in the acceleration of the fund disbursement process from previously requiring 2–3 days to only a few hours, the reduction in the use of physical documents (paperless), and improvements in the accuracy and transparency of financial transaction data. However, the implementation has not yet been fully optimal. Several challenges remain, including limited technological infrastructure, system and network disruptions, suboptimal integration with the Regional Government Information System (SIPD), limited banking service features—particularly for interbank transactions—and insufficient human resource competencies in operating the system. These conditions imply that the system has not yet been fully utilized to support overall efficiency. Therefore, strategic efforts are required to enhance the effectiveness of SP2D Online implementation, including improving human resource capacity through continuous training, strengthening information technology infrastructure, optimizing system integration with SIPD, and enhancing synergy with banking institutions to support digital transaction services. With these optimizations, it is expected that SP2D Online can maximally improve the efficiency, transparency, and accountability of regional financial management.

Keyword: *SP2D Online, efficiency, regional financial management, digitalization, transparency, accountability*

Abstrak

Implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan sistem

informasi keuangan daerah dan perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SP2D Online dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif bahwa penerapan SP2D Online memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan percepatan proses pencairan dana dari sebelumnya memerlukan waktu 2–3 hari menjadi hanya beberapa jam, pengurangan penggunaan dokumen fisik (paperless), serta peningkatan akurasi dan transparansi data transaksi keuangan. Namun demikian, implementasi SP2D Online belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan sistem dan jaringan, belum optimalnya integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), keterbatasan fitur layanan perbankan terutama dalam transaksi antar bank, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya pemanfaatan sistem dalam mendukung efisiensi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi SP2D Online, antara lain melalui peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi integrasi sistem dengan SIPD, serta peningkatan sinergi dengan pihak perbankan dalam mendukung layanan transaksi digital. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan implementasi SP2D Online dapat secara maksimal meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *SP2D Online, efisiensi, pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi sistem keuangan daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Proses pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Salah satu tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan dana melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Secara konvensional, proses penerbitan SP2D masih dilakukan secara manual, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pencairan dana, tingginya penggunaan dokumen fisik, serta risiko kesalahan administrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah mulai mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi melalui penerapan SP2D Online. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah serta sistem perbankan. Implementasi SP2D Online diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh proses

manual. Selain itu, penerapan sistem ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Di lingkungan Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, implementasi SP2D Online telah mulai diterapkan sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem ini membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pencairan dana, dari yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama menjadi lebih cepat dan efisien. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi SP2D Online belum sepenuhnya berjalan optimal.

Beberapa kendala masih dihadapi dalam penerapan sistem ini, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, gangguan jaringan, serta belum optimalnya integrasi dengan sistem lain seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selain itu, keterbatasan layanan perbankan, khususnya dalam mendukung transaksi antar bank, juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan SP2D Online. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, yang masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SP2D Online memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, namun implementasinya masih memerlukan berbagai perbaikan dan optimalisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana implementasi SP2D Online mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan penerapannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SP2D Online serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.

Menurut Halim (2014), pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar pencairan dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam sistem konvensional, proses penerbitan SP2D dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik yang memerlukan waktu relatif lama dan rentan terhadap kesalahan administrasi.

Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan SP2D Online sebagai bentuk digitalisasi proses pencairan dana daerah. SP2D Online merupakan sistem yang memungkinkan penerbitan dan pengiriman SP2D dilakukan secara elektronik melalui integrasi antara sistem informasi keuangan daerah dan sistem perbankan.

Menurut Wibowo (2021), penerapan SP2D Online mampu mempercepat proses pencairan dana, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meningkatkan ketepatan data transaksi, serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, SP2D Online menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Konsep Efisiensi dalam Sektor Publik

Efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja organisasi sektor publik. Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara input dan output, di mana suatu organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, efisiensi dapat diukur melalui:

1. Kecepatan penyelesaian proses administrasi.
2. Pengurangan biaya operasional.
3. Pengurangan penggunaan sumber daya.
4. Minimnya kesalahan administrasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Penerapan SP2D Online diharapkan mampu meningkatkan efisiensi karena sebagian besar proses dilakukan secara otomatis dan terintegrasi sehingga mempercepat pencairan dana serta mengurangi pekerjaan administratif yang bersifat manual.

4. Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, prosedur, dan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan organisasi. Menurut Indrajit (2016), sistem informasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas organisasi melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan relevan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi berfungsi untuk:

- Mengelola data keuangan secara terintegrasi.
- Mendukung proses pengambilan keputusan.
- Mempercepat proses administrasi keuangan.
- Meningkatkan akurasi dan keamanan data.
- Mempermudah proses monitoring dan evaluasi.

Implementasi SP2D Online merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sistem informasi yang mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem perbankan.

5. Teori E-Government

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas administrasi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Indrajit (2016), tujuan utama penerapan e-government adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerapan teknologi digital, pemerintah dapat menyederhanakan proses birokrasi serta mempercepat penyampaian layanan kepada masyarakat.

SP2D Online merupakan salah satu implementasi e-government dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik sehingga mampu mengurangi prosedur birokrasi yang berbelit-belit serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan.

6. Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Menurut UNDP (1997), penerapan good governance bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip good governance diwujudkan melalui:

- Transparansi pengelolaan anggaran.
- Akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
- Efektivitas pelayanan publik.
- Efisiensi proses administrasi.
- Pengawasan yang berkelanjutan.

Implementasi SP2D Online mendukung penerapan good governance karena seluruh proses pencairan dana terdokumentasi secara digital, dapat dipantau secara real time, serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2021) menunjukkan bahwa implementasi SP2D Online mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan proses pencairan dana dan pengurangan kesalahan administrasi.

Rahmawati (2022) menemukan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Putra (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mempercepat penyediaan informasi keuangan.

Sementara itu, Firmansyah (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi informasi, integrasi sistem, serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SP2D Online berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kualitas integrasi sistem, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem yang digunakan.

8. Kerangka Pemikiran

Implementasi SP2D Online → Integrasi Sistem Informasi dan Perbankan → Percepatan Pencairan Dana → Pengurangan Dokumen Fisik → Peningkatan Akurasi Data → Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas → Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana implementasi SP2D Online mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi berbagai kendala dan strategi optimalisasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi SP2D Online dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dilakukan. Penelitian dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan

langsung dengan implementasi SP2D Online, seperti operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pejabat perbendaharaan, serta bendahara pengeluaran. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan SP2D Online dalam sistem. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk menggali informasi terkait implementasi sistem, efektivitas penggunaan SP2D Online, serta kendala yang dihadapi dalam operasionalnya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung alur proses penerbitan SP2D mulai dari pengajuan hingga pencairan dana. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta bukti pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penggunaan sistem SP2D Online dan SIPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang valid.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi SP2D Online, terutama dari aspek efisiensi waktu, penggunaan dokumen, dan tingkat kesalahan administrasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SP2D Online dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 1, Ibu Mimi Femiyanti, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Bendahara Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Nicholas Rudolf, serta Narasumber 2 yang merupakan operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SP2D Online dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, implementasi SP2D Online di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari upaya transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pencairan dana, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah dan perbankan. Dari perspektif kebijakan dan manajerial, Narasumber 1 menegaskan bahwa penerapan SP2D Online telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pencairan dana, yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem elektronik yang lebih cepat dan terstruktur. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Narasumber 2 sebagai operator SIPD yang secara langsung mengelola sistem, bahwa integrasi antara

SP2D Online dan SIPD RI memberikan kemudahan dalam penginputan data serta mempercepat alur kerja. SIPD berperan sebagai sistem utama dalam pengelolaan data keuangan, yang kemudian menjadi dasar dalam proses penerbitan SP2D secara elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi secara digital, serta memungkinkan pemantauan proses pencairan dana secara real time.

Dari aspek efisiensi, kedua narasumber sepakat bahwa implementasi SP2D Online memberikan dampak positif yang signifikan. Proses pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga hari kerja, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, tergantung pada kelengkapan dokumen dan kondisi sistem. Selain itu, penggunaan dokumen fisik mengalami penurunan secara drastis karena sebagian besar proses telah dilakukan secara elektronik (paperless), sehingga memberikan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Peningkatan akurasi data juga menjadi salah satu manfaat utama, karena sistem mampu meminimalisir kesalahan administrasi yang sering terjadi pada proses manual. Namun demikian, implementasi SP2D Online belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, kendala utama yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi antara SP2D Online dengan SIPD RI, yang terkadang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data dan perbedaan informasi antara kedua sistem. Selain itu, gangguan jaringan internet dan kondisi sistem yang belum stabil juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari.

Dari sisi eksternal, keterbatasan layanan perbankan, khususnya dalam mendukung transaksi antar bank, juga menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi kelancaran proses pencairan dana. Kondisi ini menyebabkan beberapa transaksi masih harus dilakukan secara manual atau melalui mekanisme tambahan, sehingga mengurangi tingkat efisiensi yang diharapkan.

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, kedua narasumber mengungkapkan bahwa masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem SP2D Online dan SIPD RI. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan serta adanya pembaruan sistem yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan koordinasi dengan pihak pengembang sistem dan perbankan, serta pelaksanaan pelatihan bagi pegawai secara berkala. Selain itu, upaya optimalisasi integrasi antara SP2D Online dan SIPD RI juga terus dilakukan guna mendukung kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SP2D Online telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk mencapai optimalisasi yang lebih maksimal. Integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi factor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi SP2D Online ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Implementasi SP2D Online di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini menggantikan mekanisme manual dalam proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem perbankan.

Secara operasional, alur proses dimulai dari penginputan data keuangan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui SIPD, dilanjutkan dengan verifikasi oleh bidang perbendaharaan, hingga penerbitan SP2D secara elektronik dan pencairan dana melalui bank. Seluruh proses dilakukan secara digital, sehingga memungkinkan pemantauan secara real time serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SP2D Online memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi waktu menjadi indikator utama, di mana proses pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu 2–3 hari kerja kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Selain itu, terjadi pengurangan signifikan dalam penggunaan dokumen fisik (paperless), yang berdampak pada penurunan biaya operasional dan peningkatan efisiensi administrasi.

Dari aspek kualitas data, sistem ini mampu meningkatkan akurasi dan konsistensi data keuangan, karena proses pencatatan dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Transparansi juga meningkat, karena seluruh proses pencairan dana dapat dipantau secara langsung oleh pihak terkait melalui sistem.

Namun demikian, implementasi SP2D Online belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi belum maksimalnya integrasi antara SP2D Online dan SIPD, yang terkadang menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data. Selain itu, gangguan jaringan internet dan sistem yang belum stabil turut mempengaruhi kelancaran operasional. Dari sisi eksternal, keterbatasan layanan perbankan, khususnya dalam transaksi antar bank, masih menjadi hambatan. Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SP2D Online berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori efisiensi sektor publik yang menyatakan bahwa efisiensi tercapai apabila output yang dihasilkan meningkat dengan penggunaan input yang minimal (Mahmudi, 2015). Dalam konteks ini, SP2D Online mampu mempercepat proses pencairan dana, mengurangi biaya administrasi, serta menyederhanakan alur kerja. Dari perspektif sistem informasi, implementasi SP2D Online mencerminkan penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui integrasi data dan otomatisasi proses (Indrajit, 2016). Sistem ini tidak hanya meningkatkan kecepatan proses, tetapi juga kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari implementasi SP2D Online menunjukkan kesesuaian dengan prinsip good governance (UNDP, 1997). Sistem yang berbasis digital memungkinkan seluruh proses tercatat dan dapat dipantau secara real time, sehingga mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Permasalahan integrasi sistem antara SP2D Online dan SIPD menunjukkan bahwa interoperabilitas sistem masih menjadi tantangan utama dalam digitalisasi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori e-government yang menyatakan bahwa integrasi sistem merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi teknologi informasi di sektor publik.

Kendala infrastruktur, seperti gangguan jaringan dan keterbatasan sistem, menunjukkan bahwa dukungan teknologi yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan operasional sistem. Sementara itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Dari sisi perbankan, keterbatasan layanan transaksi antar bank menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SP2D Online juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kesiapan mitra kerja dalam mendukung sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pihak perbankan dalam mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Secara komparatif, implementasi SP2D Online menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan sistem manual, terutama dalam aspek efisiensi waktu, pengurangan dokumen fisik, peningkatan akurasi data, serta transparansi proses. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SP2D Online memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Namun, untuk mencapai efisiensi yang optimal, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, terutama dalam hal penguatan infrastruktur teknologi, optimalisasi integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kerja sama dengan pihak perbankan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi SP2D Online secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SP2D Online di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan efisiensi tersebut tercermin secara nyata melalui beberapa indikator utama, yaitu percepatan waktu pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu 2–3 hari kerja menjadi hanya dalam hitungan jam, pengurangan penggunaan dokumen fisik melalui penerapan sistem paperless, serta peningkatan akurasi, konsistensi, dan transparansi dalam pengelolaan data keuangan daerah.

Dari sisi proses bisnis, SP2D Online mampu menyederhanakan alur kerja pengelolaan keuangan melalui otomatisasi tahapan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Integrasi dengan Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memungkinkan data keuangan terhubung secara sistematis, sehingga mempercepat proses verifikasi dan meminimalisir potensi kesalahan administrasi. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas, karena seluruh proses pencairan dana terdokumentasi secara digital dan dapat dipantau secara real time oleh pihak terkait, termasuk untuk keperluan audit dan pengawasan.

Namun demikian, implementasi SP2D Online belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala masih dihadapi, antara lain belum maksimalnya integrasi antara SP2D Online dan SIPD yang menyebabkan terjadinya keterlambatan sinkronisasi data, gangguan jaringan internet dan stabilitas sistem, keterbatasan fitur layanan perbankan khususnya dalam transaksi antar bank, serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas sistem, serta kapasitas organisasi dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa SP2D Online memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, untuk mencapai kinerja yang optimal, diperlukan upaya penguatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan dalam berbagai aspek pendukung implementasi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Yogyakarta: Andi.
- Bastian, I. (2014). *Sistem akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pratama, A. (2022). Digitalisasi keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 45–56.
- Sari, D. (2023). Implementasi e-government dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 12–25.
- Putra, R. (2021). Efisiensi sistem informasi keuangan daerah berbasis digital. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(3), 78–90.
- Rahmawati, L. (2022). Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1), 33–47.

- Wibowo, H. (2021). Implementasi SP2D Online dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 5(2), 60–72.
- Nugroho, Y. (2020). Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 15–28.
- Firmansyah, D. (2023). Evaluasi penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 4(2), 101–115.
- Kurniawan, A. (2022). Analisis efektivitas e-government dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 89–102.
- Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*.